Daftar Pustaka

A. Buku Literatur:

A. Dzauli, Fiqh Siyasah (Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah), Cetakan Kelima, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013

AAGN Ari Dwipayana Dkk, *Pembaharuan Desa Secara Partisipatif*, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003.

Abdul Karim Zaidan, *Hak-Hak Rakyat dan Kewajiban Negara dalam Islam*, Cetakan Pertama, Lingkaran Studi Nusantara, Yogyakarta, 1983.

Abdul Muin Salim, *Fiqh Siyasah (Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Quran)*, Cetakan Ketiga, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.

Ahmad Azhar Basyir, *Negara dan Pemerintahan dalam Islam*, Cetakan Kedua, UII Press, Yogyakarta, 2000.

Albert Hasibuan, dkk, Otonomi Daerah (Peluang dan Tantangan), Cetakan Pertama, PT Sinar Agape Press, Jakarta, 1995.

Amrah Muslimin, *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah*, Cetakan Pertama, Alumni, Bandung, 1978.

Andi Pangerang Moenta dan H. Syafa'at Anugrah Pradana, Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah, Cetakan Pertama, Rajawali Pers, Depok, 2018.

Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001.

C.S.T. Kansil, Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah Dilengkapi dengan pemerintahan desa dan pembangunan desa, Cetakan Ketiga, Aksara Baru, Jakarta, 1985.

_____, *Desa Kita (Dalam Peraturan Tata Pemerintahan Desa)*, Cetakan Pertama, Ghalian Indonesia (GI), Jakarta, 1983.

C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pemerintahan Daerah di Indonesia (Hukum Administrasi Daerah)*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

Encik Muhammad Fauzan, *Hukum Tata Negara Indonesia,* Cetakan Pertama, Setara Press, Malang, 2016.

Daeng Sudirwo, *Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan Pemerintahan Desa*, Cetakan Pertama, ANGKASA, Bandung, 1985.

Didik Sukrioono, *Pembaharuan Pemerintah Desa (Politik Hukum Pemerintahan Desa di Indonesia),* Cetakan Pertama, Setara Press, Malang, 2010.

G. Kartasapoetra, R.G. Kartasapoetra dkk, *Desa dan Daerah Dengan Tata Pemerintahannya,* Cetakan Pertama, Bina Aksara, Jakarta, 1986.

Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*,Cetakan Pertama, Erlangga, Jakarta, 2011.

Hari Sabarno, *Untaian Pemikiran Otonomi Daerah (Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa),* Cetakan Pertama, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2007.

Haw. Widjaja, *Pemerintahan Desa / Marga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Suatu Telaah Administrasi Negara),* Cetakan Kedua, PT. RajaGrafindo Persada, 2002.

I. Nyoman Beratha, *Desa Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa,* Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia (GI), 1982.

Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, Cetakan Pertama, Gema Insani Press, Jakarta, 2000

Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia (Identifikasi Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya)*, Cetakan Kedua, Rajawali, Jakarta, 1991.

Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah*, Cetakan Pertama, PT. Alumni, Bandung, 2004.

Lili Romli, *Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat di Tingkat Local*,Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007.

Lukman Santoso Az, *Hukum Pemerintahan Daerah (Mengurai Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi di Indonesia),* Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015.

Moch. Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,* cetakan pertama, Setara Press, Malang, 2012.

Moh. Fadli, Jazim Hamidi, Mustafa Lutfi, *Pembentukan Peraturan Desa Partisipasif (Head To A Good Village Governance*), Cetakan Pertama, UB Press, Malang, 2011.

Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum (Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini),* Cetakan Pertama, PT. Karya Unipress, Jakarta, 1992.

Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara (ajaran, sejarah dan pemikiran)*, Cetakan Pertama, UI Press, Jakarta, 1990.

Murtir Jeddawi, *Memacu Investasi di Era Otonomi Daerah (Kajian Beberapa Perda tentang Penanaman Modal)*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2005.

_____, *Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah (Analisis Kewenangan, Kelembagaan, Manajemen, Kepegawaian, dan Peraturan Daerah),* Cetakan Pertama, Kreasi Total Media Yogyakarta, Yogyakarta, 2008.

Ni'matul Huda,*Otonomi Daerah (Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika)*, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar OFFSET, Yogyakarta, 2005.

_____, *Hukum Pemerintahan Daerah*, cetakan pertama, Nusa Media, Bandung, 2009.

_____, *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah*, Cetakan Pertama, FH UII PRESS, Yogyakarta, 2010.

_____, *Hukum Pemerintahan Desa*, Cetakan Pertama, Setara Press ,Malang, 2015.

R. Agustoha Kuswata, *Manajemen Pembangunan Desa (Pedoman Program Terpadu),* Cetakan Pertama, CV. Gramada, Jakarta, 1985.

Ridwan, *Hukum Administrasi di Daerah,* Cetakan Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2009.

Ridwan H.R., *Fiqih Politik (Gagasan, harapan dan kenyataan)*, Cetakan Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2007.

Rusdianto Sesung, *Hukum Otonomi Daerah (Negara Kesatuan, Daerah Istimewa dan Daerah Otonomi Khusus)*, Cetakan Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2013.

Salman dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Cetakan Pertama, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2012.

Sirajudin, Anis Ibrahim dkk, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, Cetakan Pertama, Setara Press, Malang, 2016.

Suhartono dkk, *Parlemen Desa (Dinamika DPR Kalurahan Dan DPRK Gotong-royong)*, Cetakan Pertama, Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta, 2000

Taliziduhu Ndraha, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, Cetakan Kedua, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1984.

Tjahya Supriatna, *Sistem Administrasi Pemerintahan di Daerah*, Cetakan Kedua, Bumi Aksara, Jakarta, 1996.

Yusnani Hasyimzoem,dkk, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Cetakan Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2017.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa.

C. Website / Internet

http://galur.kulonprogokab.go.id/pages-20-profil.html, diakses pada Sabtu, 19 Mei 2018, pada Pukul 22.45 WIB.

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt594adc217e6f3/penyalahgunaan-alokasi-dana-desa-oleh-perangkat-desa, diakses pada Senin 12 Februari 2018 pukul 18.00 WIB.

https://kbbi.web.id/efektif, diakses pada Kamis, 24 Mei 2018, pada Pukul 13.47 WIB.

https://kbbi.web.id/efisien, diakses pada Kamis, 24 Mei 2018, pada Pukul 13.50 WIB.

http://www.kulonprogokab.go.id/v21/kecamatan-galur_79_hal, diakses pada Senin, 21 Mei 2017, pada Pukul 21.03 WIB.

http://www.kulonprogokab.go.id/v21/Kondisi-Umum_6_hal, diakses pada Sabtu, 19 Mei 2018, Pukul 11.50 WIB.

http://www.kulonprogokab.go.id/v21/profil-bupati-kulon-progo_227_hal, diakses pada Sabtu, 19 Mei 2018, pada Pukul 22.30 WIB.

http://www.kulonprogokab.go.id/v21/profil-wakil-bupati-kulon-progo_228_hal, diakses pada Sabtu, 19 Mei 2018, pada Pukul 22.40 WIB.

http://www.kotawates.com/kulon-progo-dan-adikarto-laksana-dua-negara-menjadi-satu.html, diakses pada Sabtul, 19 Mei 2018, pada Pukul 12.37 WIB.

http://www.markijar.com/2016/07/otonomi-daerah-lengkap-pengertian-dasar.html, diakses pada 5 maret 2018, pukul 17.20.